

KPP PRATAMA JAKARTA
KALIDERES

Kanwil DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak

2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan nomor 53/2014), bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis nasional.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kalideres mengacu pada Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN dapat berperan sebagai alat kendali serta pengukuran kinerja secara kuantitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance*, juga berfungsi sebagai perbaikan secara berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja semua unit operasional di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres.

Bersama ini kami sampaikan LAKIN Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi KPP Pratama Jakarta Kalideres.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik

Yudi Asmara Jaka Lelana

NIP. 197102121996031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIN dapat berperan sebagai alat kendali serta pengukuran kinerja secara kuantitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance*, juga berfungsi sebagai perbaikan secara berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja semua unit operasional di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kalideres.

Capaian kinerja dapat digambarkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana merupakan ukuran keberhasilan yang dapat menggambarkan terwujudnya kinerja, hasil kegiatan, dan tercapainya program yang menjadi sasaran Kantor Pelayanan Pajak demi tercapainya target penerimaan pajak. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang berhasil untuk memberikan gambaran kinerja utama di instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang diharapkan untuk memberikan gambaran posisi kinerja instansi pemerintah demi terwujudnya organisasi yang akuntabel serta menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik.

Tujuan yang hendak dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Kalideres adalah: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres berkomitmen:

1. Meningkatkan pengawasan kepatuhan pada Wajib Pajak.
2. Meningkatkan realisasi pencairan tunggakan pajak.
3. Meningkatkan realisasi dan kualitas pemeriksaan pajak.
4. Melakukan upaya penyisiran pada Wajib Pajak yang belum terdaftar.
5. Melakukan upaya ekstensifikasi dan memanfaatkan data eksternal guna menggali potensi perpajakan sehingga diharapkan target penerimaan akan tercapai dengan terus meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Sasaran yang akan dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Kalideres yaitu:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi.
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif.
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif.
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif.
7. Penegakan hukum yang efektif.
8. Data dan Informasi yang berkualitas.

9. SDM yang kompeten.
10. Organisasi yang berkinerja tinggi.
11. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal.

Kesebelas Sasaran Strategis di atas diimplementasikan lebih lanjut dalam 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan sebagai target dan alat ukur capaian kinerja yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat. Capaian Kinerja KPP Pratama Jakarta Kalideres sampai dengan akhir tahun 2024 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kalideres adalah sebesar Rp2,106,266,629,800 atau mencapai 101,32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,078,726,797,000.
2. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto tercapai 100,00% dari target sebesar 100,00%.
3. Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ditetapkan sebesar 100,00% dan tercapai 110,08%.

Dalam rangka merealisasikan target penerimaan tersebut terdapat beberapa faktor pendukung baik dari pihak eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang sangat signifikan dalam mempengaruhi tercapainya penerimaan pajak adalah sudah adanya predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi di KPP Pratama Jakarta Kalideres dari MENPAN-RB. Sehingga partisipasi Wajib Pajak dan masyarakat di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kalideres yang menjadi lebih tinggi karena meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan KPP Pratama Jakarta Kalideres menjadi faktor pendorong pencapaian target penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Kalideres. Sedangkan salah satu faktor internal yang mendukung keberhasilan adalah Integritas yang tinggi para pegawai yang bekerja keras dan juga bekerja ikhlas dalam meraih prestasi yang didukung oleh berbagai inovasi untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan.

Dengan adanya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memotivasi, memberikan pedoman dan evaluasi untuk seluruh jajaran pegawai KPP Pratama Jakarta Kalideres guna mengatasi berbagai permasalahan yang akan dihadapi ke depannya dan terus memperbaiki kinerja guna mewujudkan komitmen untuk dapat merealisasikan target penerimaan pajak selanjutnya yang ditetapkan pemerintah.

KPP Pratama Jakarta Kalideres berkomitmen akan meningkatkan pengawasan kepatuhan pada Wajib Pajak, meningkatkan realisasi pencairan tunggakan pajak, meningkatkan realisasi dan kualitas pemeriksaan pajak, melakukan upaya

penyisiran pada Wajib Pajak yang belum terdaftar, melakukan upaya ekstensifikasi dan memanfaatkan data eksternal guna menggali potensi perpajakan sehingga diharapkan target penerimaan akan tercapai dengan terus meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres sebelum resmi berdiri, merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Barat Dua yang diresmikan tanggal 2 Maret 2005 seiring dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-86/PJ/2007 yang diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2007.

Dalam rangka penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern maka dilakukan perubahan dan penggabungan pada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Barat Dua menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kalideres. KPP Pratama Jakarta Kalideres resmi beroperasi pada tanggal 2 Oktober 2007.

Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kalideres meliputi 5 kelurahan yaitu Kalideres, Pegadungan, Kamal, Tegal Alur, dan Semanan. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kalideres sebanyak 208.524 Wajib Pajak yang terdiri dari 12.755 Wajib Pajak Badan, 44.232 Wajib Pajak Orang Pribadi non Karyawan dan 151.537 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

KPP Pratama Jakarta Kalideres dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2007 Tanggal 31 Mei 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.

Pembentukan KPP Pratama Jakarta Kalideres merupakan wujud dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak secara bertahap sebagai pelaksanaan "*Good Governance*" dan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas organisasi instansi vertikal DJP dengan penggabungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (KPPBB) dan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa) menjadi beberapa KPP Pratama dengan wilayah kerja tertentu.

KPP Pratama Jakarta Kalideres mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

A. Kedudukan

KPP Pratama Jakarta Kalideres merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat.

KPP Pratama Jakarta Kalideres merupakan pecahan dari KPP Cengkareng, efektif melaksanakan fungsinya mulai tanggal 26 Juni 2007 dan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-86/PJ/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya KPP Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kanwil DJP di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selain Kanwil DJP Jakarta Pusat. Saat mulai beroperasinya KPP Pratama Jakarta Kalideres adalah tanggal 2 Oktober 2007 yang berkedudukan di Jalan Duri Kosambi nomor 36-37, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.

B. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPP Pratama Jakarta Kalideres menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan Pajak;
- b. Penyuluhan pajak;
- c. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- e. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- f. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- g. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- h. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
- i. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- j. pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- k. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- l. pemeriksaan pajak;
- m. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

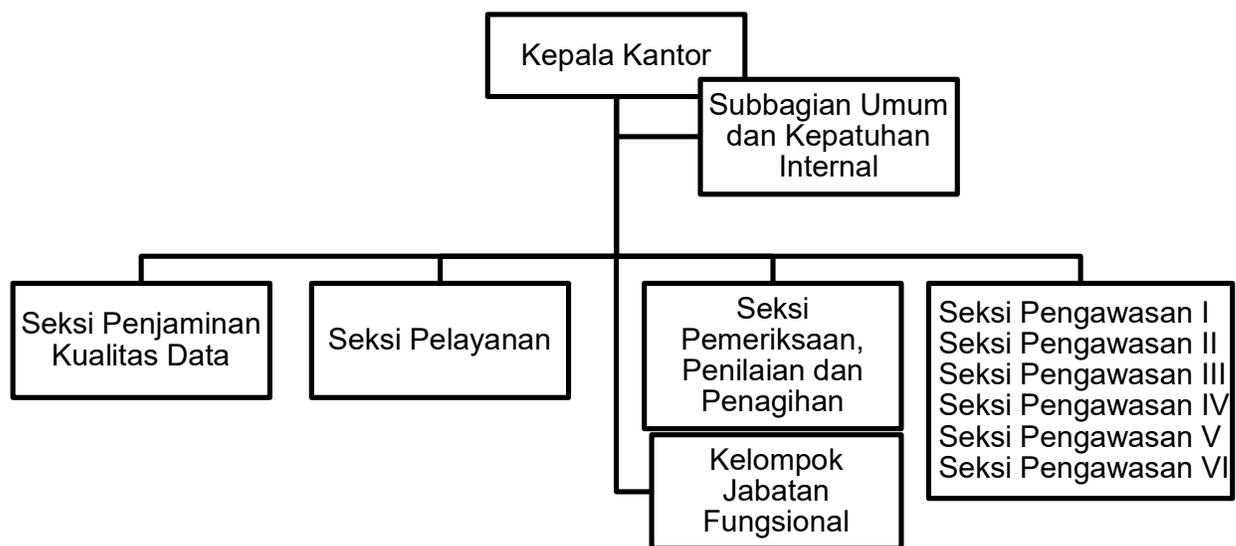
- n. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- o. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- p. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
- q. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- r. pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak;
- s. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- t. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- u. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- v. pelaksanaan administrasi kantor.

D. Struktur Organisasi

KPP Pratama Jakarta Kalideres memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan pengolahan data perpajakan;
- c. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan

- dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan pemeriksaan, penilaian, dan penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI, melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundangundangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan, dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan pengawasan perpajakan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Fungsional Pemeriksa Pajak, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres

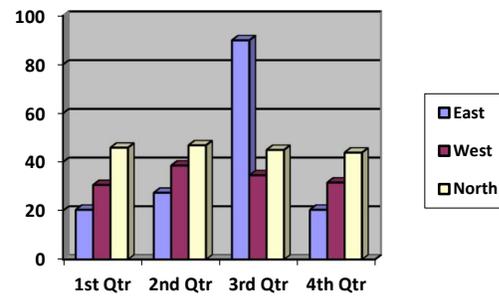
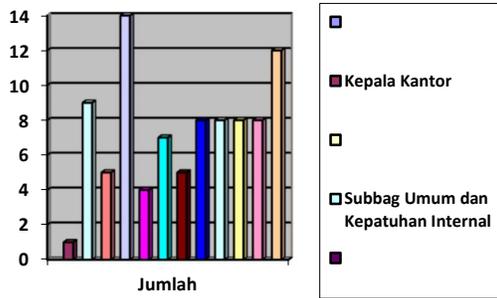
E. Sumber Daya Manusia

Gambaran singkat pegawai pada KPP Pratama Jakarta Kalideres berdasarkan data SIKKA per Desember 2024 berjumlah 101 orang dengan rincian sebagai berikut:

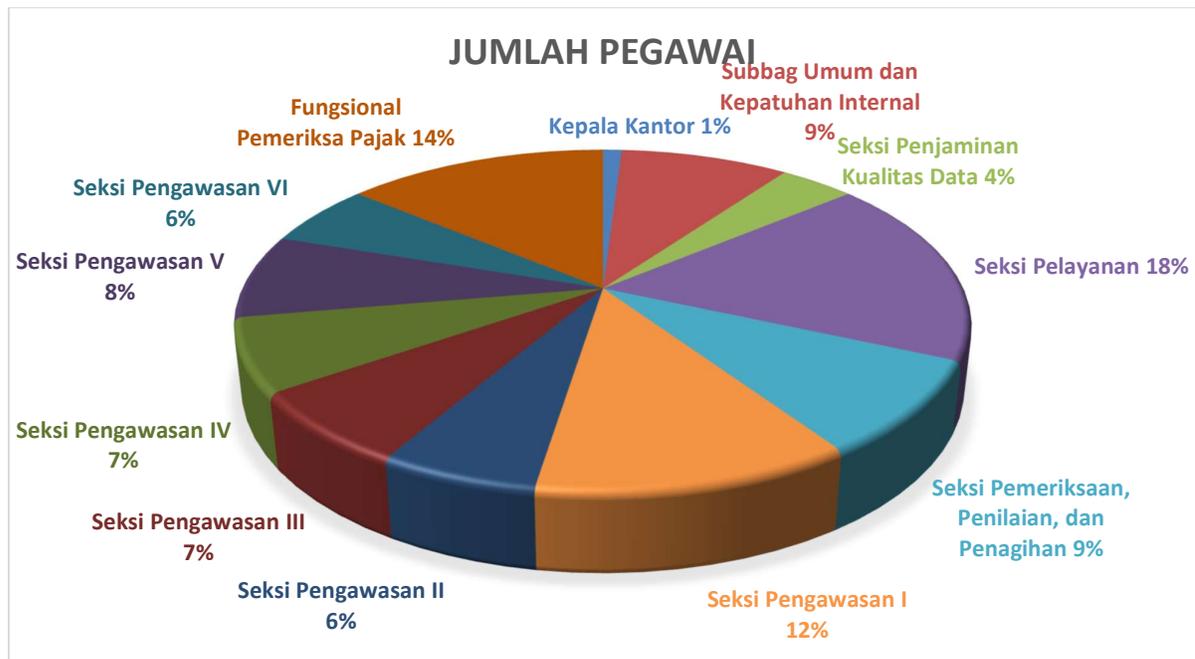
Pendidikan		Golongan		Jabatan	
Jenjang	Jumlah	Golongan	Jumlah	Jabatan	Jumlah
S2	11	IV	8	Kepala Kantor	1
S1/D4	51	III	56	Kasi/Kasubbag	10
D3/Sarmud	17	II	37	AR	37
D1	20			Fungsional	21
SLTA	2			Pelaksana	32

Tabel 1. Penyebaran Pegawai berdasarkan Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan

Unit Kerja	Jumlah
Kepala Kantor	1
Subbag Umum dan Kepatuhan Internal	9
Seksi Penjaminan Kualitas Data	4
Seksi Pelayanan	18
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	9
Seksi Pengawasan I	12
Seksi Pengawasan II	6
Seksi Pengawasan III	7
Seksi Pengawasan IV	7
Seksi Pengawasan V	8
Seksi Pengawasan VI	6
Fungsional Pemeriksa Pajak	14
Jumlah:	101



Tabel 2. Penyebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Unit Kerja



Grafik 1. Persentase Jumlah Pegawai di KPP Pratama Jakarta Kalideres

No.	Unit Kerja	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I
1	Kepala Kantor	1	-	-	-
2	Sub Bag Umum dan Kepatuhan Internal	-	1	8	-
3	Seksi Penjaminan Kualitas Data	-	1	3	-
4	Seksi Pelayanan	1	9	8	-
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	1	1	7	-

6	Seksi Pengawasan I	-	11	1	-
7	Seksi Pengawasan II	-	5	1	-
8	Seksi Pengawasan III	2	3	2	-
9	Seksi Pengawasan IV	-	7	-	-
10	Seksi Pengawasan V	-	5	3	-
11	Seksi Pengawasan VI	1	4	1	-
12	Fungsional Pemeriksa	2	9	3	-
	Jumlah	8	56	37	-

Tabel 3. Penyebaran pegawai berdasarkan golongan

Tingkat pendidikan SDM pada KPP Pratama Kalideres bervariasi mulai dari Sekolah Menengah Atas sampai dengan Pasca Sarjana dengan penyebaran sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	S2	S1/D4	D3	D1	SMA	SMP	Jumlah
1	Kepala Kantor	1	-	-	-	-	-	1
2	Subbag Umum dan Ketaatan Internal	1	2	2	4	-	-	9
3	Seksi Penjaminan Kualitas Data	-	-	2	2	-	-	4
4	Seksi Pelayanan	1	6	3	6	2	-	18
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	1	2	2	4	-	-	9
6	Seksi Pengawasan I	-	9	1	2	-	-	12
7	Seksi Pengawasan II	-	5	1	-	-	-	6
8	Seksi Pengawasan III	2	3	1	1	-	-	7
9	Seksi Pengawasan IV	-	6	1	-	-	-	7
10	Seksi Pengawasan V	1	6	1	-	-	-	7
11	Seksi Pengawasan VI	1	5	-	-	-	-	6
12	Fungsional Pemeriksa Pajak	3	7	4	-	-	-	14
	Jumlah	11	51	17	20	2	-	101

Tabel 4. Penyebaran Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Aspek strategis dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah selalu berusaha memberikan pelayanan prima, bersikap profesional, dan selalu menciptakan suasana kerja yang kondusif sebagai wujud dari pertanggungjawaban kepada para Wajib Pajak. Target utama kami adalah meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan cara membangun hubungan yang didasari dengan profesionalisme, keterbukaan, dan sikap keramahan, baik dalam konteks pembinaan, pelayanan, sosialisasi, sehingga diharapkan adanya peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dan perubahan persepsi Wajib Pajak yang positif terhadap kinerja KPP Pratama Jakarta Kalideres.

Untuk menghadapi tahun pajak 2025, KPP Pratama Jakarta Kalideres berkomitmen akan meningkatkan pengawasan kepatuhan pada Wajib Pajak, meningkatkan realisasi pencairan tunggakan pajak, meningkatkan realisasi dan kualitas pemeriksaan pajak, melakukan upaya penyisiran pada wajib pajak yang belum terdaftar, melakukan upaya ekstensifikasi dan memanfaatkan data eksternal guna menggali potensi perpajakan sehingga diharapkan target penerimaan akan tercapai dengan terus meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun dihitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2015-2019 sehingga program-program yang terdapat dalam *masterplan* searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Renstra DJP Tahun 2020 – 2024 telah melewati proses penyusunan yang cukup panjang. Dimulai pada awal tahun 2019 melalui tahapan penyusunan visi dan misi, dilanjutkan dengan tahapan pengembangan strategi serta tahapan terakhir yaitu penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

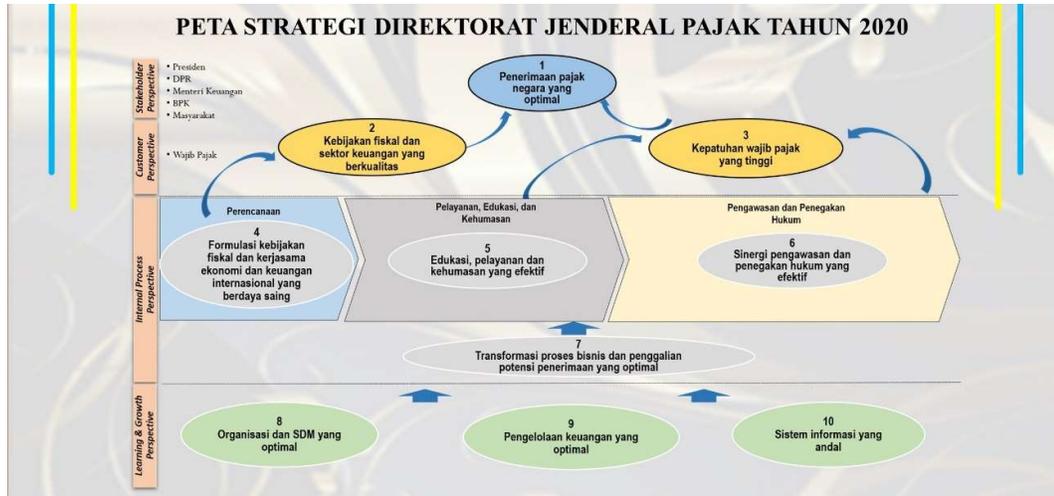
a. Rasio Perpajakan terhadap PDB

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak

Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari: Sumber Daya Manusia yang kompetitif, organisasi dan transformasi yang handal, sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pelaksanaan anggaran yang optimal masing-masing dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.

Dalam pelaksanaannya hal tersebut mendukung proses yang diantaranya, terdiri dari: pelayanan prima, peningkatan efektivitas penyuluhan, peningkatan efektivitas kehumasan, peningkatan ekstensifikasi perpajakan, peningkatan pengawasan Wajib Pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan kehandalan data. Selanjutnya dari proses tersebut ditunjang dengan pemenuhan layanan publik diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-

langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI, MISI, DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah 'Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara'. Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi 'Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. **Integritas** – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. **Profesionalisme** – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. **Sinergi** – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. **Pelayanan** – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. **Kesempurnaan** – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi DJP.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerja sama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

1. VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi KPP Pratama Jakarta Kalideres adalah menjadi KPP Pratama terbaik dan terpercaya dalam memberikan pelayanan dan menghimpun penerimaan pajak.

Visi tersebut merefleksikan cita-cita KPP Pratama Jakarta Kalideres untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintah lainnya dengan tingkatan standar dunia atau standar internasional yang modern baik untuk kualitas aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil-hasilnya sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi KPP Pratama Jakarta Kalideres adalah:

- a. Memberikan Pelayanan Prima sehingga Wajib Pajak mendapatkan Kepuasan dan Kebanggaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- b. Mengumpulkan Penerimaan Negara melalui kepatuhan sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, satu sampai lima tahun ke depan. Oleh karena itu sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan KPP Pratama Jakarta Kalideres memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan cara membangun hubungan yang didasari dengan profesionalisme, keterbukaan, dan sikap keramahan, baik dalam konteks pembinaan, pelayanan, maupun sosialisasi sehingga diharapkan adanya penerimaan pajak dari tahun ke tahun dan perubahan persepsi Wajib Pajak yang positif terhadap kinerja KPP Pratama Jakarta Kalideres.

4. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, sasaran strategis selama tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi.
- c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.
- d. Edukasi dan pelayanan yang efektif.
- e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif.
- f. Pengawasan kepatuhan material yang efektif.

- g. Penegakan hukum yang efektif.
- h. Data dan Informasi yang berkualitas.
- i. SDM yang kompeten.
- j. Organisasi yang berkinerja tinggi.
- k. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal.

5. KEBIJAKAN

Demi tercapainya dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan, ditetapkan kebijakan-kebijakan yang dijadikan pedoman, petunjuk atau pegangan bagi setiap usaha kegiatan KPP Pratama Jakarta Kalideres yakni:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. Meningkatkan pencapaian rencana penerimaan PPh;
- c. Meningkatkan pencapaian rencana penerimaan PPN dan PPn BM;

6. PROGRAM

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, maka dicanangkan program peningkatan dan pengamanan penerimaan perpajakan yang dapat dicapai dengan program-program sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana;
- b. Pembenahan berkas Wajib Pajak;
- c. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan;
- d. Percepatan penyelesaian permohonan;
- e. Intensifikasi PPh;
- f. Ekstensifikasi PPh;
- g. Penagihan PPh;
- h. Pengawasan administrasi PPh;
- i. Intensifikasi PPN dan PPn BM;
- j. Ekstensifikasi PPN dan PPn BM;
- k. Pengawasan administrasi PPN dan PPn BM;
- l. Penagihan PPN dan PPn BM;

B. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Sasaran strategis KPP Pratama Jakarta Kalideres yang tertuang dalam Penetapan Kinerja 2024 secara garis besar menunjukkan sebagian besar tercapainya target yang telah ditetapkan.

1. Sasaran Strategis: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, Persentase realisasi penerimaan pajak berhasil dicapai 101,32% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas berhasil tercapai yaitu 100 dari target sebesar 100.
2. Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi, Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ditetapkan target sebesar 100,00% dan tercapai 110,08%, dan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dengan target sebesar 100,00% tercapai sebesar 101,39%.
3. Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi, Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dengan target 100,00% tercapai sebesar 100,74%.
4. Sasaran Strategis: Edukasi dan pelayanan yang efektif, Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan ditetapkan target sebesar 70,00% dan tercapai 88,80%. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan ditetapkan target sebesar 100,00% tercapai 107,59%.
5. Sasaran Strategis: Pengawasan pembayaran masa yang efektif, Persentase pengawasan pembayaran masa ditetapkan target sebesar 90,00% tercapai sebesar 118,32%.
6. Sasaran Strategis: Pengujian kepatuhan material yang efektif, Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ditetapkan sebesar 100,00% tercapai 120,00%. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan ditetapkan target sebesar 100,00% tercapai 120,00%.
7. Sasaran Strategis: Penegakan hukum yang efektif, Tingkat efektivitas pemeriksaan ditetapkan target sebesar 80,00% dengan realisasi 131,55%, Tingkat efektivitas penagihan ditetapkan sebesar 75,00% tercapai 111,30%, dan Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan bukti permulaan ditetapkan target sebesar 100,00% dengan realisasi 120,00%.

8. Sasaran Strategis: Data dan Informasi yang berkualitas, Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan ditetapkan target sebesar 100,00% tercapai sebesar 156,56%.
9. Sasaran Strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif, tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM ditetapkan sebesar 100,00 dan tercapai sebesar 117,22.
10. Sasaran Strategis: Organisasi yang berkinerja tinggi, indeks penilaian integritas Unit ditetapkan target 85 tercapai sebesar 97,29 dan indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko ditetapkan target sebesar 90,00 dan tercapai sebesar 96,55.
11. Sasaran Strategis: Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal, Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran ditetapkan sebesar 100 dan tercapai sebesar 120.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku *KKO-One* dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, Sasaran Strategis, dan IKU/IKI Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan Rencana strategis, Rencana Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usulan IKU/IKI baru, hapus, maupun perbaikan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja digunakan untuk mengukur dan memonitor kinerja dalam suatu organisasi dengan cara membandingkan rencana kerja berupa target dengan realisasinya diakhir tahun

1) Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	101,32%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	101,39%
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	110,08%
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,74%
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%
	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	15,00%	107,59%
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,32%

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,49%
7. Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%
	Tingkat efektivitas Penagihan	45,00%	111,30%
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	75,00%	120,00%
8. Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	80,00%	156,56%
9. SDM yang kompeten	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,22
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,29
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	70,00	96,55
10. Pengelolaan Keuangan yang optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00

Tabel 5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kalideres

Secara umum target IKU KPP Pratama Jakarta Kalideres Tahun 2024 sebagaimana yang tertera didalam tabel dapat tercapai dengan sangat baik. Terdapat 19 IKU yang ditetapkan dari awal tahun 2024 dan semua IKU tersebut dapat tercapai dengan baik. KPP Pratama Jakarta Kalideres telah menjalankan komitmen dengan baik pada tahun 2024. KPP Pratama Jakarta Kalideres akan mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja kantor di tahun 2025.

Target dan realisasi pada poin A diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase realisasi penerimaan pajak.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	26%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
Realisasi	20,86%	46,02%	46,02%	72,90%	72,90%	101,32%	101,32%
Capaian (Max 120)	80,23%	90,24%	90,24%	94,68%	94,68%	101,32%	101,32%

Sumber : Aplikasi Mandiri

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Target penerimaan pajak KPP Jakarta Kalideres merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Barat yang didistribusikan KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase realisasi	105,29%	101,90%	121,66%	102,06%	101,32%

penerimaan pajak					
---------------------	--	--	--	--	--

Sumber : Aplikasi Mandor

KPP Pratama Jakarta Kalideres telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Kalau dilihat dari segi persentase, capaian penerimaan tahun 2024 turun jika dibandingkan dengan tahun 2023. Namun dari segi nominal, KPP Pratama Jakarta Kalideres tahun 2024 berhasil mengumpulkan penerimaan sebanyak Rp 2.106.266.629.800 yang dimana pada tahun 2023 KPP Pratama Jakarta Kalideres hanya berhasil mengumpulkan sebanyak Rp 1.520.413.513.198. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan penerimaan sebanyak 38.53% dibandingkan penerimaan tahun 2023.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	-	100%	101,32%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi penerimaan pajak ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
----------	-------------	------------------	----------------

Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	101,32%
---------------------------------------	------	------	---------

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Membuat rencana kerja tahunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; 	2025

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas berhasil tercapai yaitu 100 dari target sebesar 100.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	91,44	93,59	93,59	96,18	96,18	100	100
Capaian (Max 120)	91,44	93,59	93,59	96,18	96,18	100	100

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan

Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen serta pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

- Formula IKU

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	-	100

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini bukan merupakan IKU baru, namun terdapat substansi yang berubah sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2023. Walaupun terdapat perubahan, KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu mencapai dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	-	100	100

Sumber : Aplikasi Mandor

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan	100	100	100

pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas			
--	--	--	--

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
Koordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Pelayanan untuk lebih mendekati angka dari penerimaan rutin maupun non rutin, serta mendapatkan angka restitusi yang lebih presisi di bulan berjalan	2025

b. Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) memiliki target yang ditetapkan sebesar 100,00% dan tercapai 101,39%.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	26%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
Realisasi	20,06%	45,92%	45,92%	75,29%	75,29%	101,39%	101,39%
Capaian (Max 120)	77,15%	90,04%	90,04%	97,78%	97,78%	101,39%	101,39%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal

Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	102,34%	100,61%	101,01%	101,39%

Sumber : Aplikasi Mandor

KPP Pratama Jakarta Kalideres telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam 4 (empat) tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Dapat dikatakan KPP Pratama Jakarta Kalideres dapat mencapai IKU ini dengan baik dari awal.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	-	100%	101,32%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi penerimaan pajak ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	101,39%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
--------------	---------

Membuat sasaran prioritas Wajib Pajak yang akan digali potensi agar lebih optimal pencapaiannya	2025
---	------

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ditetapkan sebesar 100,00% dan tercapai 110,08%.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	85,11%	96,86%	96,86%	109,91%	109,91%	110,08%	110,08%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	110,08%	110,08%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan dan SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

- Formula IKU

(1,2 x Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT + Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT / Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023) x 100%

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	-	110,08%

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini bukan merupakan IKU baru, namun terdapat substansi yang berubah sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2023. Walaupun terdapat perubahan, KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu mencapai dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase capaian	100	100	-	100	100

tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi					
---	--	--	--	--	--

Sumber : Aplikasi Mandor

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	110,08%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
--------------	---------

Sosialisasi terkait kewajiban penyampaian SPT Tahunan melalui berbagai media, baik secara luring maupun daring	2025
--	------

c. Sasaran Strategis (SS) 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) ditetapkan target sebesar 100,00% dan tercapai sebesar 100,74%.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	33,71%	47,30%	47,30%	50,16%	50,16%	100,74%	100,74%
Capaian (Max 120)	120,00%	94,30%	94,30%	66,88%	66,88%	100,74%	100,74%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala

Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	-	95,36%	97,51%	73,50%	100,74%

Sumber : Aplikasi Mandor

Tahun 2024 merupakan pertama kalinya KPP Pratama Jakarta Kalideres dapat mencapai target dengan baik. Hal ini merupakan capaian yang sangat luar biasa oleh KPP Pratama Jakarta Kalideres pada tahun 2024. Kedepannya KPP Pratama Jakarta Kalideres akan tetap berusaha mempertahankan prestasi ini.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam	Target Tahun 2024 dalam	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam	Realisasi

	Renja DJP	Renstra DJP		Perjanjian Kinerja	
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100	100	-	100	100

Sumber : Aplikasi Mandor

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100,74%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti data pemicu dan SP2DK yang belum LHP2DK • Menyelenggarakan sharing session yang berfokus pada metode penggalan potensi pajak yang efektif dalam meningkatkan penerimaan perpajakan yang ditujukan khusus untuk Kepala Seksi Pengawasan, AR dan FPP 	2025

d. Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan ditetapkan target sebesar 74,00% dan tercapai 88,80%.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	21,91%	58,73%	58,73%	87,41%	87,41%	88,80%	88,80%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU
Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap

upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

- Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	-	88,80%

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini bukan merupakan IKU baru, namun terdapat substansi yang berubah sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2023. Walaupun terdapat perubahan, KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu mencapai dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	74%	-	74%	88,80%

Sumber : Aplikasi Mandor

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	74%	88,80%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
Melakukan sosialisasi khususnya kepada pemerintah daerah untuk mengedukasi kewajiban lapor SPT untuk pegawai	2025

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan ditetapkan target sebesar 100,00% tercapai 107,59%.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	5%	10%	10%	15%	15%	85%	85%
Realisasi	6,31%	12,66%	12,66%	19,00%	19,00%	107,59%	107,59%
Capaian (Max 120)	120,0%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

- Survei efektivitas penyuluhan terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- Survei efektivitas kehumasan terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	-	-	107,59%

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini bukan merupakan IKU baru, namun terdapat substansi yang berubah sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2023. Walaupun terdapat perubahan, KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu mencapai dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam	Realisasi

		Renstra DJP		Perjanjian Kinerja	
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	85%	85%	-	85%	107,59%

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	85%	85%	107,59%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
Menyelenggarakan IHT Pelayanan Prima kepada seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Kalideres	2025

e. Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase pengawasan pembayaran masa ditetapkan target sebesar 90,00% dan tercapai sebesar 118,32%.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	113,72%	113,72%	114,55%	114,55%	118,32%	118,32%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- Formula IKU

$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	-	-	118,32%

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini bukan merupakan IKU baru, namun terdapat substansi yang berubah sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2023. Walaupun terdapat perubahan, KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu mencapai dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa perencanaan kas	90%	90%	-	90%	118,32%

Sumber : Aplikasi Mandor

Persentase pengawasan pembayaran masa ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	118,32%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
Menyelenggarakan Forum AR	2025

f. Sasaran Strategis (SS) 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ditetapkan sebesar 100,00% tercapai 120,00%.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	115,86%	115,86%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	N/A	115,86%	115,86%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- Formula IKU

$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian})$

permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya
(Berbasis Kewilayahan)

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	-	-	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini bukan merupakan IKU baru, namun terdapat substansi yang berubah sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2023. Walaupun terdapat perubahan, KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu mencapai dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat

dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
Membuat Rapor Kinerja <i>Account Representative</i> untuk sesama <i>Account Representative</i> agar bisa menjadi motivasi	2025

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan ditetapkan sebesar 100,00% dan tercapai 120,00%.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	118,75%	110,53%	110,53%	114,64%	114,64%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	118,75%	110,53%	110,53%	114,64%	114,64%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU
Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pemanfaatan Data Matching

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- Formula IKU

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP} + \text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	-	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini bukan merupakan IKU baru, namun terdapat substansi yang berubah sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2023. Walaupun terdapat perubahan, KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu mencapai dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
Pembuatan IHT untuk meningkatkan kompetensi AR dalam penerbitan produk hukum seperti STP	2025

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditetapkan sebesar 100,00% dan tercapai 118,49%.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	104,92%	104,92%	118,49%	118,49%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	104,92%	104,92%	118,49%	118,49%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite	-	-	-	-	118,49%

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu					
--	--	--	--	--	--

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini merupakan IKU baru. Walaupun demikian, KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu mencapai IKU ini dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	-	100%	118,49%

Sumber : Aplikasi Mandor

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite	100%	100%	120%

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu			
--	--	--	--

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
Menyusun laporan komite kepatuhan dan melaporkan sesuai periode waktu yang telah ditentukan	2025

g. Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan hukum yang efektif

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian ditetapkan sebesar 100,00% tercapai 120,00%.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	97,47%	107,07%	107,07%	123,73%	123,73%	131,55%	131,55%
Capaian (Max 120)	97,47%	107,07%	107,07%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

$$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$$

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	-	131,55%

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini merupakan IKU baru karena adanya penambahan aspek penilaian. Walaupun terdapat penambahan, KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu mencapai dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat efektivitas Pemeriksaan	100%	100%	-	100%	131,55%

dan Penilaian					
------------------	--	--	--	--	--

Sumber : Aplikasi Mandor

Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	131,55%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
Melakukan monitoring atas pemeriksaan yang masih berjalan	2025

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Tingkat efektivitas Penagihan ditetapkan sebesar 75,00% tercapai 111,30%.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	27,87%	56,92%	56,92%	106,41%	106,41%	111,30%	111,30%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak.

- Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Tingkat efektivitas Penagihan	-	-	-	-	111,30%

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini bukan merupakan IKU baru, namun terdapat substansi yang berubah sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2023. Walaupun terdapat perubahan, KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu mencapai dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024	Target Tahun 2024 dalam	Target Tahun 2024	Target Tahun 2024 dalam	Realisasi

	dalam Renja DJP	Renstra DJP	dalam RPJMN	Perjanjian Kinerja	
Tingkat efektivitas Penagihan	100%	100%	-	100%	111,30%

Sumber : Aplikasi Mandor

Tingkat efektivitas Penagihan ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Tingkat efektivitas Penagihan	100%	100%	111,30%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
Pembuatan laporan piutang pajak yang belum tertagih serta menentukan target prioritas piutang yang akan ditagih	2025

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ditetapkan target sebesar 100,00% dengan realisasi 120,00%.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	25,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan	-	-	-	-	120%

Bukti Permulaan					
-----------------	--	--	--	--	--

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini merupakan IKU baru. Terdapat IKU yang serupa pada tahun 2022, namun terdapat perbedaan dari segi substansi. Walau begitu, KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu mencapai dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan	100%	100%	120%

Bukti Permulaan			
-----------------	--	--	--

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Jakarta Barat untuk membahas rencana penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	2025

h. Sasaran Strategis (SS) 8: Data dan Informasi yang berkualitas

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 156,56%.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	30,39%	87,85%	87,85%	122,54%	122,54%	156,56%	156,56%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- Formula IKU

<i>(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan) + (Persentase penyediaan data potensi perpajakan)</i>	X 100%
2	

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	-	156,56%

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini bukan merupakan IKU baru, namun terdapat substansi yang berubah sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2023. Walaupun terdapat perubahan, KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu mencapai dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan	100%	100%	-	100%	156,56%

data potensi perpajakan					
----------------------------	--	--	--	--	--

Sumber : Aplikasi Mandor

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%	156,56%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan inventaris data Wajib Pajak yang melakukan Perdagangan Melalui Sarana Elektronik/ PMSE di wilayah kerja KPP Pratama Kalideres untuk diusulkan dilakukan pengamatan. Merencanakan dan melakukan kegiatan pengamatan kepada Wajib Pajak dengan setiap seksi 	2025

mengusulkan minimal 2 Wajib Pajak yang akan dilakukan pengamatan dengan tim pengamatan seksi lain atau gabungan.	
--	--

i. Sasaran Strategis (SS) 9: SDM yang kompeten

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM ditetapkan sebesar 100,00 dan tercapai sebesar 117,22.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	118,54%	120,00%	120,00%	113,05%	113,05%	117,22%	117,22%
Capaian (Max 120)	118,54%	120,00%	120,00%	113,05%	113,05%	117,22%	117,22%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek. Aspek 1, Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70 = secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20 = coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10 = belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

- Formula IKU

$$(Capaian Komponen 1 \times 50\%) + (Capaian Komponen 2 \times 50\%)$$

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	117,22%
---	---	---	---	---	---------

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini bukan merupakan IKU baru, namun terdapat substansi yang berubah sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2023. Walaupun terdapat perubahan, KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu mencapai dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	100%	-	100%	117,22%

Sumber : Aplikasi Mandor

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil

merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	100%	117,22%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
Pegawai mengerjakan E-Learning baik di KLC2 maupun pada studiA	2025

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Indeks Penilaian Integritas Unit ditetapkan target sebesar 85,00% tercapai 97,29%.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	N/A	N/A	N/A	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,0%	100,0%	97,29%	97,29%
Capaian (Max 120)	N/A	N/A	N/A	117,65%	117,65%	114,46%	114,46%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif,

dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	94,75	89,64	97,29

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini berhasil tercapai selama tiga tahun berturut. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil mempertahankan realisasi IKU ini di tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam	Realisasi

		Renstra DJP		Perjanjian Kinerja	
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	85	-	85	97,29

Sumber : Aplikasi Mandor

Indeks Penilaian Integritas Unit kas ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	85	97,29

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan sosialisasi dengan tema antikorupsi dan anti gratifikasi kepada pegawai melalui kegiatan Morning Activity maupun ICV (Internal Corporate Value) Melakukan pemantauan kepatuhan pegawai dalam pelaksanaan penugasan kepada Wajib Pajak 	2025

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko ditetapkan sebesar 90,00 dan tercapai sebesar 96,55.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	23,36%	47,65%	47,65%	82,52%	82,52%	96,55%	96,55%
Capaian (Max 120)	101,57%	101,38%	101,38%	117,89%	117,89%	107,28%	107,28%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai

kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko	-	-	-	-	96,55%

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini bukan merupakan IKU baru, namun terdapat substansi yang berubah sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2023. Walaupun terdapat perubahan, KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu mencapai dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi

Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko	90%	90%	-	90%	96,55%
---	-----	-----	---	-----	--------

Sumber : Aplikasi Mandor

Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko	90%	90%	96,55%

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
Melaksanakan rapat membahas Nilai Kinerja Organisasi bulanan sebagai	2025

bentuk penjagaan NKO Kepala Kantor	
------------------------------------	--

j. Sasaran Strategis (SS) 10: Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari lima komponen, yaitu penyerapan anggaran, efisiensi, konsistensi, Capaian keluaran riil serta Kinerja IKPA dengan realisasi sebesar 120,00 sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar 100,00.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	95,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	104,71%	104,30%	104,30%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	104,71%	104,30%	104,30%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

- Formula IKU

(50% x SMART + 50% x IKPA)

- Realisasi IKU

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	120%
--	---	---	---	---	------

Sumber : Aplikasi Mandor

IKU ini bukan merupakan IKU baru, namun terdapat substansi yang berubah sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2023. Walaupun terdapat perubahan, KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu mencapai dengan baik.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	100%	-	100%	100%

Sumber : Aplikasi Mandor

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini sejalan dengan Rencana Kerja DJP maupun Rencana Strategis DJP sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Jakarta Kalideres berhasil merealisasikannya dengan baik di tahun 2024. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dari banyak pihak seperti pegawai KPP sendiri dan Wajib Pajak.

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi 2024
Indeks kinerja kualitas	100%	100%	120%

pelaksanaan anggaran			
-------------------------	--	--	--

Sumber : Aplikasi Mandor

Realisasi KPP Pratama Jakarta Kalideres telah memenuhi target yang ditentukan sesuai dengan standar nasional yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Aksi	Periode
Memaksimalkan Penyerapan Anggaran sesuai target IKU	2025

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Beberapa Tahun Terakhir (2023 dan 2022)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024	Kenaikan (Penurunan)	2023	Kenaikan (Penurunan)	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	101,32%	-0,74%	102,06%	-17,94%	120,00%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	-	-	-	-
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101,39%	0,38%	101,01%	0,4%	100,61%

	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	110,08%	-	-	-	-
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,74%	27,24%	73,50%	-24,01%	97,51%
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	88,80%	-	-	-	-
	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	107,59%	-	-	-	-
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	118,32%	-	-	-	-
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120,00%	-	-	-	-
	Persentase pemanfaatan	120,00%	-	-	-	-

	data selain tahun berjalan					
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	118,49%	-	-	-	-
7. Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas Pemeriksaan	120,00%	-	-	-	-
	Tingkat efektivitas Penagihan	111,30%	-	-	-	-
	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	120,00%	-	-	-	-
8. Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	156,56%	-	-	-	-
9. SDM yang kompeten	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	117,22	-	-	-	-
	Indeks Penilaian Integritas Unit	97,29	7,65	89,64	-5,11	94,75
	Indeks efektivitas implementasi manajemen	96,55	-	-	-	-

	kinerja dan manajemen risiko					
10. Pengelolaan Keuangan yang optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120,00	-	-	-	-

Tabel 6. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Terdapat banyak perubahan IKU tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Dari 19 IKU terdapat 13 IKU yang mengalami perubahan serta tambahan 2 IKU baru dibandingkan tahun 2023. Perubahan 13 IKU tersebut merupakan penyempurnaan formula IKU serta satuan pengukuran IKU. Penambahan 2 IKU baru di tahun 2024 yaitu Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dan Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

3) Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Kalideres Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Mandor	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	100,76
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,76
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	101,32%	Max	E/L	26%	57,78%	101,32
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,00	Max	P/L	19%	42,22%	100,00
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,90
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,06
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	101,39%	Max	E/L	26%	57,78%	101,39
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampalan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	110,08%	Max	P/L	19%	42,22%	110,08
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,74
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,74%	Max	E/M	21%	100,00%	100,74
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	119,90
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							120,00
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	85,00%	107,59%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,32%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,50
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,49%	Max	P/M	14%	33,33%	118,49
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	111,30%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	120,00%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	156,56%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,49
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,97
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebtalanan SDM	100,00	117,22	Max	P/M	14%	33,33%	117,22
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	97,29%	Max	P/M	14%	33,33%	114,46
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,55	Max	P/M	14%	33,33%	107,28
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,91

Tabel 7. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kalideres

Seluruh IKU KPP Pratama Jakarta Kalideres dapat terealisasi melampaui Standar Nasional. Rencana Kerja KPP Pratama Jakarta Kalideres telah selaras dengan Jangka Menengah Organisasi Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 berdasarkan KEP-389/PJ/2020.

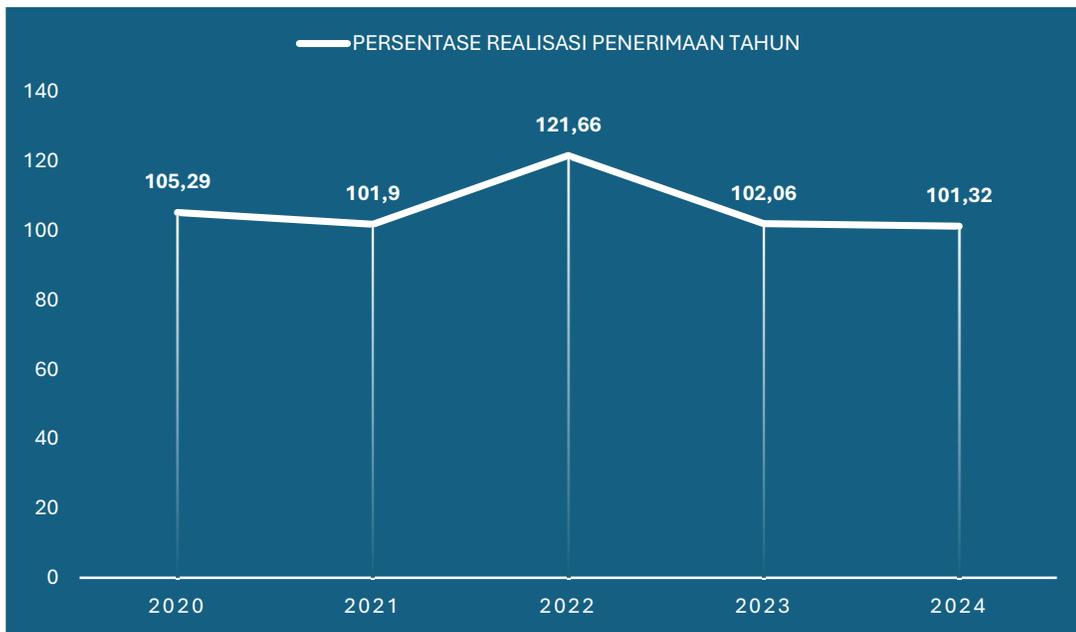
4) Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi

Keberhasilan dan kegagalan kinerja dapat dilihat dengan pengukuran kinerja yang merupakan proses yang sistematis dalam menilai hasil akhir pencapaian dari kegiatan organisasi sesuai dengan program, kebijakan, demi tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi untuk menghimpun pajak demi merealisasikan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Tabel Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan Target (%)	Pencapaian (%)
2020	1.846.544.456.000	1.944.148.893.053	(8,38)	105,29
2021	1.401.605.645.000	1.428.188.542.509	(24,09)	101,90
2022	1.449.775.548.000	1.763.787.115.232	3,43	121,66
2023	1.532.602.323.000	1.564.100.073.974	5,71	102,06
2024	2.078.726.797.000	2.106.266.629.800	35,63	101,32

Tabel 8. Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir



Grafik 2. Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Kalideres

KPP Pratama Jakarta Kalideres telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam 4 (empat) tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Kalau dilihat dari segi persentase, capaian penerimaan tahun 2024 turun jika dibandingkan dengan tahun 2023. Namun dari segi nominal, KPP Pratama Jakarta Kalideres tahun 2024 berhasil mengumpulkan penerimaan sebanyak Rp 2.106.266.629.800 yang dimana pada tahun 2023 KPP Pratama Jakarta Kalideres hanya berhasil mengumpulkan sebanyak Rp 1.520.413.513.198. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan penerimaan sebanyak 38.53% dibandingkan penerimaan tahun 2023.

Tekad dan komitmen KPP Pratama Jakarta Kalideres adalah untuk kembali merealisasikan target penerimaan pajak tahun 2024 tercapai 100%, dengan didukung seluruh komponen yang terlibat dalam lingkungan kantor yang merujuk pada nilai-nilai Kementerian Keuangan yang di antaranya adalah integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Kelima komponen tersebut merupakan komitmen kami untuk menunjang dan merealisasikan penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu melakukan sosialisasi perpajakan, meningkatkan intensitas kegiatan konseling Wajib Pajak, melaksanakan *WhatsApp Blast* sebagai pengingat kewajiban perpajakan WP, berpegang teguh pada prinsip nilai-nilai Kementerian Keuangan dan terus bekerja maksimal demi tercapainya penerimaan pajak.

5) Analisis Atas Efisiensi SDM

Permasalahan pada sisi SDM adalah kurangnya jumlah pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan administratif kantor. Hal ini disebabkan karena selama tahun 2024 jumlah beban kerja pelaksana lebih banyak daripada jumlah pelaksana yang ada. Ditambah lagi pelaksana untuk posisi tertentu dibatasi oleh status (CPNS atau PNS), *grade*, dan pendidikan sehingga mengurangi fleksibilitas dalam penempatan pegawai di internal KPP sementara ada keterbatasan pula dalam hal jumlah pegawai yang memenuhi syarat.

Adanya Jabatan baru berupa Fungsional Penyuluh Pajak membuat kinerja penyuluhan dan penyelesaian permohonan Wajib Pajak menjadi kurang efisien, dikarenakan dalam jabatan tersebut terdapat banyak pekerjaan-pekerjaan baru bagi Fungsional Penyuluh itu sendiri.

KPP Pratama Jakarta Kalideres selalu berkomitmen dan berupaya membentuk pegawai yang profesional, mempunyai integritas yang tinggi, loyal, dan dapat bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Dengan selalu bertambahnya target penerimaan pajak yang ditetapkan dari waktu ke waktu, maka keterbatasan atas SDM ini dikhawatirkan bisa menjadi salah satu penghalang dalam mencapai target penerimaan pajak tahun 2025 nantinya.

Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Jakarta Kalideres yaitu telah membuat surat usulan permintaan penambahan tenaga pelaksana dan usulan berbagai diklat untuk pegawai. Selain itu pemberian pelatihan-pelatihan internal kepada pegawai akan terus ditingkatkan untuk menjaga kualitas SDM.

6) Program Yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa program atau kegiatan yang secara signifikan sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2024 adalah Program *Call Center* Satuan Tugas (Satgas) SPT 2024, Program Peningkatan Kinerja Pegawai (*Account Representative*, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Pelaksana), dan Rapat Rutin Monitoring Capaian IKU Kantor/Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Program *Call Center* Satgas SPT bertujuan untuk dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak dengan cara menghubungi melalui aplikasi *WhatsApp*

secara personal kepada WP OP ataupun direktur/tax admin WP Badan. Dalam program *Call Center*, Wajib Pajak diberikan himbauan untuk segera melakukan pelaporan SPT Tahunan dan diberikan tawaran untuk dipandu secara langsung di KPP untuk pelaporan SPT Tahunan.

Program Pemeringkatan Kinerja Pegawai (*Account Representative*, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Pelaksana) bertujuan untuk memonitoring capaian kinerja tiap pegawai dan memberikan apresiasi/penghargaan berupa sertifikat dan hadiah bagi pegawai dengan 3 peringkat tertinggi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memacu semangat kerja seluruh pegawai agar dapat memenuhi seluruh target yang diberikan.

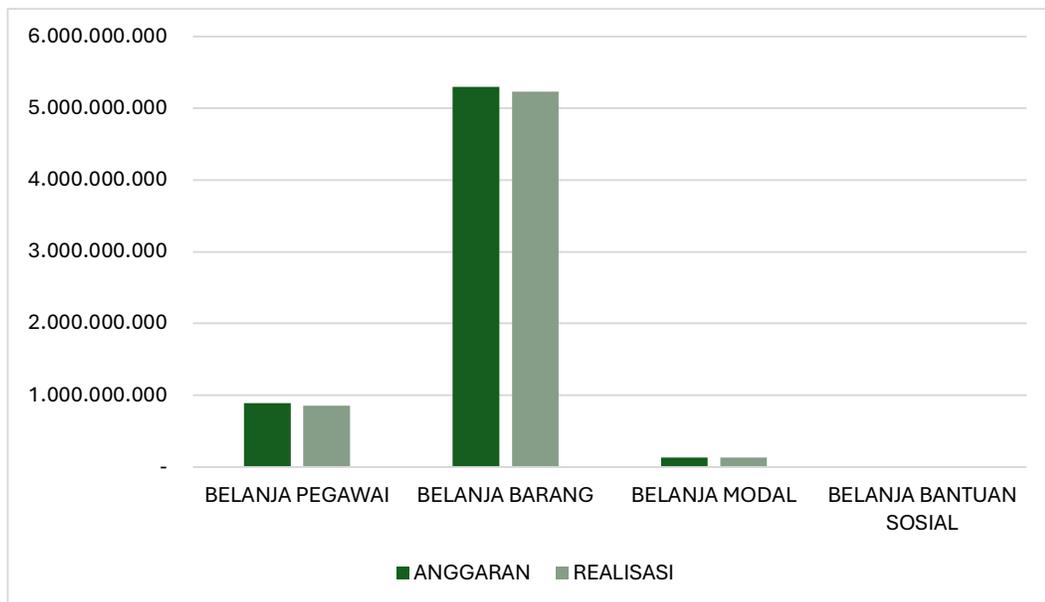
Rapat Rutin Monitoring Capaian IKU Kantor/NKO dilaksanakan setiap bulan dan lebih intens dilaksanakan di akhir tahun. Rapat tersebut dilaksanakan untuk memonitor capaian kinerja kantor secara umum dan capaian kinerja seluruh seksi secara khusus serta mendiskusikan strategi-strategi untuk dapat mencapai target yang diberikan.

B. REALISASI ANGGARAN DAN PENCAPAIAN OUTPUT BELANJA

Realisasi belanja instansi pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 6.215.840.450 atau 98,41% dari anggaran belanja sebesar Rp 6.316.262.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REAL ANGG.
BELANJA PEGAWAI	887.477.000	855.649.000	96,41%
BELANJA BARANG	5.299.226.000	5.231.020.750	98,71%
BELANJA MODAL	129.559.000	129.170.700	99,70%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	-	-	-
TOTAL BELANJA KOTOR	6.316.262.000	6.215.840.450	98,41%
PENGEMBALIAN	-	-	-
Jumlah	6.316.262.000	6.215.840.450	98,41%

Tabel 9. Realisasi Anggaran



Grafik 3. Realisasi Anggaran KPP Pratama Jakarta Kalideres

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Kalideres Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa faktor utama yang mendukung tercapainya penerimaan pajak di tahun 2024 sebesar 101,32% adalah:

- a. Komitmen KPP Pratama Jakarta Kalideres dalam menjaga predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK);
- b. Sinergi yang optimal antar pegawai dan seksi di KPP Pratama Jakarta Kalideres;
- c. Partisipasi Wajib Pajak yang tinggi dalam pembayaran kewajiban perpajakan.

Kendala internal yang dihadapi pada tahun 2024 adalah terdapat banyak pemegang jabatan baru dan kurangnya tenaga pelaksana dalam pelaksanaan tugas administratif dan operasional di KPP Pratama Jakarta Kalideres.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang maka langkah yang dilakukan adalah untuk terus meningkatkan kemampuan *skill* SDM yang profesional melalui diklat, monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan agar mencapai target atau melebihi target penerimaan pajak, serta memberikan pelayanan administrasi perpajakan kepada Wajib Pajak dengan cara membangun hubungan yang didasari profesionalisme, keterbukaan dan sikap keramahan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan penuh tanggung jawab, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat memberikan umpan balik peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik

Yudi Asmara Jaka Lelana

NIP. 197102121996031001



KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES

Jalan Raya Duri Kosambi No.36 - 37, RT.10/RW.7,
Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat - 11750

Telp. 021-5405998,5406029,5406043

Faks. 021-5410315

Whatsapp. 0811-1259-1259